

VAKSINASI COVID-19, OMBUDSMAN JATENG SAMBUT BAIK ANTUSIASME MASYARAKAT

Jum'at, 05 Maret 2021 - Bellinda Wasistiyana Dewanty

SEMARANG, suaramerdeka.com - Kepala [Ombudsman RI](#) Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida menyambut baik antusiasme masyarakat yang sadar pentingnya saling menjaga. Dengan siap divaksin Covid-19, menandakan masyarakat kini sudah menyadari bahaya dan dampak Covid-19, baik dari sisi kesehatan, maupun dampak pada aktivitas keseharian.

Dalam penyelenggaraan [vaksin Covid-19](#) ini ada lima poin yang Ombudsman tekankan dalam program ini. Pertama, terkait data penerima vaksin, jadi data ini harus valid, jika tidak valid dapat menyebabkan proses vaksinasi tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Hal ini menjadi salah satu penekanan penting dikarenakan masih terjadi perdebatan terkait sumber data yang akan digunakan. Kedua, menjamin baku mutu vaksin, hal ini penting karena Vaksin memungkinkan mengalami penurunan kualitas yang diakibatkan oleh *Cold Chain Management System* yang dapat terjadi apabila *Cold Chain* yang tidak bekerja dengan baik.

"Terkait adanya informasi penunjukan fasilitas kesehatan sebagai tempat pelayanan vaksinasi, namun tidak memiliki rantai dingin seperti *freezer* atau *vaccine refrigerator* sehingga harus menitipkan vaksin Covid-19 ke Fasilitas Kesehatan lain. Hal ini menjadi penting, sebab dalam distribusi dan tata penyimpanan vaksin yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan teknologi rantai dingin yang berkontribusi besar terhadap mutu vaksin," sambung Farida dalam dialog publik dengan mengangkat tema "Menanti Giliran Untuk Divaksinasi Covid-19".

Ketiga, pentingnya penanganan limbah medis vaksinasi secara handal dan *safety*. Ombudsman menekankan penanganan limbah medis vaksinasi Covid-19 dilakukan sesuai standar operasional yang sudah ditentukan. Belum adanya sistem khusus dalam pengelolaan limbah vaksin Covid-19 yang dapat menyebabkan potensi pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan limbah, seperti pengumpulan botol bekas vaksin yang digunakan untuk membuat vaksin palsu yang pernah terjadi pada tahun 2016.

"Keempat, urgensi sarana dan penanganan pengaduan terkait vaksinasi. Pentingnya pengelolaan pengaduan ini dimulai dari sarana layanan pengaduan, penanganan pengaduan bagi penerima vaksin yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan harus mendapatkan pengobatan atau perawatan di Fasilitas Kesehatan," lanjut Farida.

Terakhir, pelayanan bagi Kelompok rentan yang mungkin luput dari perhatian. Sebagaimana sasaran vaksin berbasis data dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus menyertakan kelompok rentan dan kelompok yang kesulitan dalam mengakses pelayanan publik karena keterbatasan. Misalnya: penyandang [disabilitas](#), orang-orang dengan permasalahan kesejahteraan sosial, yang tergolong pelayanan prioritas.